

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini merupakan negara penghasil dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/ CPO*) di dunia (Sadya, 2023). Minyak kelapa sawit mentah atau CPO merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit (*Elaeis guineensis dan Elaeis oleifera*) yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Minyak mentah dari kelapa sawit memiliki nilai guna yang sangat tinggi dan dapat menjadi bahan baku untuk berbagai industri, baik industri pangan maupun non-pangan. Kelapa sawit juga dinilai sebagai tanaman penghasil minyak yang lebih unggul dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, terutama dilihat dari aspek produktivitasnya (Masruroh, 2017).

Bedasarkan data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 16,83 juta hektar. Besarnya industri minyak kelapa sawit di Indonesia telah berkontribusi sangat besar bagi pembangunan ekonomi negara, mulai dari penyerapan tenaga kerja maupun dari hasil produksi melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana bagi hasil (DBH) (Kemenko, 2021). Di tahun 2023, Indonesia diperkirakan memproduksi CPO hingga 50,07 juta ton yang mana 32,21 juta ton masuk dalam komoditas ekspor (GAPKI, 2024). Pada tahun 2023,

secara keseluruhan industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 88,7 triliun rupiah terhadap APBN Indonesia (Magazine, 2023).

Gambar 1.1
Buah Sawit Indonesia



Sumber: Riauonline.co.id

Besarnya jumlah produksi CPO memungkinkan Indonesia untuk dapat mengekspor komoditas CPO ke berbagai negara, salah satunya adalah Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok sendiri sejak tahun 1950 resmi menjalin hubungan diplomatik kedua negara. Kedua negara saling memperkuat kerja sama di berbagai sektor, salah satunya dalam sektor ekonomi yakni perdagangan internasional. Tiongkok sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menjadi pasar potensial bagi komoditas-komoditas asal Indonesia, salah satunya CPO. Tingkat konsumsi CPO di Tiongkok sangatlah tinggi, menurut data dari IndexMundi (2024), konsumsi domestiknya tercatat sebesar 5.150.000 juta ton per tahunnya. Menurut data dari World Resources Institute Indonesia (2022), besarnya

jumlah konsumsi *CPO* disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang mencapai 1,4 miliar jiwa sejalan dengan jumlah konsumsinya yang besar serta hal ini juga dilatar belakangi oleh masifnya industrialisasi di Tiongkok. Industri Tiongkok yang saat ini sedang massif memiliki permintaan besar dalam *supply* bahan mentah seperti *CPO*. Pada tahun 2019 penggunaan *CPO* di Tiongkok mencapai 6,8 juta ton, kemudian tahun 2020 sebesar 6,38 juta ton, dan di tahun 2021 sebesar 6,8 juta ton. Tingkat konsumsi rakyat Tiongkok yang tinggi terhadap *CPO* tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dalam negeri yang cukup. Hal ini mengharuskan Tiongkok untuk mengimpor komoditas *CPO* untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Komoditas *Crude Palm Oil* (*CPO*) Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam tatanan *Global Value Chain* (*GVC*) industri sawit, di mana Indonesia berperan sebagai salah satu aktor dominan pada segmen hulu (*upstream*). Dengan kontribusi lebih dari 57% terhadap total ekspor minyak sawit dunia, Indonesia menjadi produsen dan eksportir utama *CPO*, namun mayoritas ekspornya masih berupa bahan mentah atau setengah jadi seperti *CPO* dan *Refined Palm Oil* (*RPO*) (UNCTAD, 2020). Menurut teori *GVC* oleh Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon (2005), posisi hulu dalam rantai nilai cenderung memberikan nilai tambah yang rendah karena nilai tertinggi justru diperoleh pada tahap hilir yang mencakup pengolahan lanjutan, distribusi, dan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dominasi volume dalam industri sawit global, negara ini belum sepenuhnya menguasai aspek yang memberikan keuntungan ekonomi paling besar dalam rantai pasok global. Nilai tambah dari produk turunan seperti

kosmetik, biodiesel, oleokimia, dan makanan olahan justru dinikmati oleh negara pengimpor seperti Tiongkok, India, dan negara-negara Uni Eropa yang memiliki industri pengolahan yang lebih maju (Taglioni & Winkler, 2016).

Secara global, distribusi ekspor CPO Indonesia menasar lebih dari 140 negara, namun kawasan Asia tetap menjadi pasar utama. Data dari GAPKI dan Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa lima negara terbesar tujuan ekspor CPO Indonesia adalah India, Tiongkok, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Belanda. Pada tahun 2023, volume ekspor sawit Indonesia mencapai sekitar 47 juta ton, dengan nilai ekspor mendekati USD 23 miliar (GAPKI, 2024). Dari jumlah tersebut, Tiongkok menempati posisi sebagai importir terbesar kedua setelah India. Tiongkok secara konsisten mengimpor sekitar 5 hingga 8 juta ton produk sawit per tahun, dan pada tahun 2023 mencatatkan volume impor sebesar 5,64 juta ton—meningkat dari 4,94 juta ton pada tahun sebelumnya (MPOC, 2024). Dari total impor tersebut, sekitar 70% hingga 72% berasal dari Indonesia, sementara sisanya berasal dari Malaysia dan negara-negara produsen lain dalam jumlah yang jauh lebih kecil (IndexBox, 2024).

Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dari Indonesia ke Tiongkok selalu mengalami nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2019 Indonesia telah mengekspor CPO ke Tiongkok sebanyak 6 juta ton, namun di tahun 2020 turun tajam hingga 4,04 juta ton. Pada tahun 2021 naik perlahan di angka 4,7 juta ton. Namun di tahun 2022 kembali menurun di angka 3,8 juta ton dan meningkat hingga 4,82 juta ton pada tahun 2023. Kegiatan ekspor CPO selalu mengalami tahun-tahun yang menantang, terutama dalam enam tahun terakhir. Hal

ini disebabkan oleh karena perdagangan internasional tidak hanya ditentukan oleh dua negara yang melakukan transaksi tetapi sangat ditentukan oleh kondisi global yang dinamis.

Perdagangan internasional komoditas sawit Indonesia, khususnya *Crude Palm Oil* (CPO), dihadapkan pada beragam hambatan struktural dan kebijakan, baik yang bersumber dari dalam negeri (internal) maupun dari negara mitra dagang seperti Tiongkok (eksternal). Dari sisi hambatan internal, permasalahan mencakup rendahnya tingkat hilirisasi produk, dominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah, serta ketidakkonsistenan kebijakan nasional. Salah satu contoh konkret adalah larangan ekspor sementara CPO pada tahun 2022, yang ditujukan untuk menjamin pasokan minyak goreng domestik, namun menimbulkan keresahan di pasar internasional dan menurunkan kepercayaan buyer terhadap keandalan Indonesia sebagai pemasok global (Kementerian Perdagangan RI, 2023; Efrita, 2021). Selain itu, rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, keterbatasan teknologi, serta lemahnya infrastruktur logistik seperti jalan kebun dan fasilitas penyimpanan turut menghambat kelancaran ekspor. Dari sisi hambatan eksternal, tantangan utama datang dari kebijakan keberlanjutan lingkungan negara mitra seperti Tiongkok yang menekankan pentingnya standar produk ramah lingkungan, termasuk sertifikasi bebas deforestasi, pelabelan pangan yang ketat, serta persyaratan *traceability* dari hulu ke hilir (Pacheco et al., 2020). Tiongkok juga semakin mengedepankan kebijakan *Green Food Development Plan* yang mendorong konsumen dan industri mereka untuk menghindari produk yang diasosiasikan dengan degradasi lingkungan. Selain hambatan teknis tersebut, hambatan tarif dan non-tarif juga

masih menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi ekspor CPO Indonesia, seperti penetapan bea masuk pada produk tertentu atau kuota terbatas untuk produk turunan.

Hambatan-hambatan perdagangan internasional juga dirasakan oleh kegiatan ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok, dalam hambatan tarif, komoditas CPO Indonesia harus melalui bea keluar dan pungutan ekspor yang jumlah pungutannya dapat berubah drastis tergantung pada harga pasar global, kemudian dari pihak Tiongkok, para eksportir Indonesia harus membayar VAT sebesar 9 persen. Hambatan non-tarif yang dirasakan adalah kondisi global seperti perang dagang pada tahun 2019, kondisi *Covid-19* yang mempengaruhi rantai pasokan dan harga penjualan minyak dunia, standarisasi produk, cuaca ekstem, dan larangan ekspor sementara telah menjadi tantangan perdagangan yang dihadapi komoditas CPO Indonesia di pasar Tiongkok.

Pada tahun 2019 terjadi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang memunculkan ketegangan dan ketidakstabilan pasar global menjadi salah satu hambatan dagang yang dirasakan oleh industri ini. Kemudian hambatan lainnya yang secara jelas dirasakan dan mempengaruhi jumlah ekspor CPO ke Tiongkok diantaranya adalah pandemi *Covid-19* yang mulai marak terjadi pada akhir tahun 2019 lalu yang mana sangat berdampak pada daya beli dan kebutuhan masyarakat terhadap CPO. Cuaca ekstrem yang terjadi pada tahun 2022 lalu yang mempengaruhi volume produksi CPO, yang berujung pada kebijakan domestik pelarangan ekspor CPO. Kemudian harga minyak bumi dan nabati dunia yang fluktuatif berdampak pula pada naik turunnya nilai ekspor CPO (Annur, 2024).

Serta isu lingkungan yang membayangi industri sawit di Indonesia telah memberikan citra buruk bagi produk sawit Indonesia. Tekanan dari organisasi dan komunitas global terhadap isu lingkungan telah menjadi sinyal akan pentingnya isu ini bagi kegiatan ekspor CPO Indonesia di negara importir, khususnya di Tiongkok. Beberapa perusahaan multinasional dan investor besar seperti Carrefour, Unilever telah menuntut transparansi dan penggunaan CPO bersertifikat RSPO. Apabila para pemasok Tiongkok tidak memenuhi standar tersebut akan beresiko hilangnya kontrak dan dana investasi. Akibatnya pemerintah Tiongkok mulai menerapkan kebijakan keberlanjutan yang lebih tegas, seperti peraturan ESG untuk korporasi dan green bond terkait rantai pasok sawit. Perusahaan asal Tiongkok seperti COFCO, Mengniu, dan Yili telah mulai memasukkan ketentuan “deforestation-free” dalam pengadaan bahan produksinya (Reuters, 2024).

Perdagangan internasional ekspor CPO ke Tiongkok telah berdampak besar bagi perekonomian nasional Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok pernah mencapai 4,8 miliar US Dollar pada tahun 2021 lalu yang mana telah berkontribusi sekitar 3,5% terhadap GDP Indonesia pada tahun itu. Hasil dari perdagangan internasional selain menyumbang pemasukan devisa negara melalui hasil produksi dan investasi asing, serta berpengaruh perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. Pada tahun 2021, Industri sawit merupakan sektor padat karya di Indonesia, dengan total tenaga kerja mencapai 16,5 juta jiwa (hai sawit, 2024). Dalam transaksi ini Tiongkok juga diuntungkan dengan terjaminnya rantai pasokan minyak sawit mentah serta harga yang stabil dari para eksportir Indonesia. Besarnya transaksi antara Indonesia dan

Tiongkok telah menunjukkan betapa pentingnya keberlanjutan perdagangan ini bagi kedua negara. Tahun 2023 Indonesia masih menjadi eksportir terbesar CPO di Tiongkok, begitu juga sebaliknya, Tiongkok juga merupakan negara tujuan ekspor CPO terbesar bagi Indonesia (BPS, 2024).

Besarnya nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok menyumbang cadangan devisa negara yang besar dan berdampak besar pula bagi perekonomian Indonesia. Selama enam tahun kebelakang, sangat disayangkan nilai dan volume ekspor CPO mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Berbagai tantangan seperti regulasi lingkungan, tekanan internasional, dan fluktuasi harga global masih menjadi hambatan dalam kelancaran ekspor. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi diplomasi dan kebijakan perdagangan yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan ekspor CPO ke Tiongkok. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional ekspor *CPO* ke Tiongkok selama tahun 2019 hingga 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan satu rumusan masalah yakni ”Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menjelaskan perdagangan internasional ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok tahun 2019 hingga 2024 serta mengkaji respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan-hambatan perdagangan dalam ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok selama tahun 2019 hingga 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis sebagai pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai kajian perdagangan internasional. Penelitian ini mengambil studi kasus tren fluktuatif ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok tahun 2019 hingga 2024 serta mengkaji penyebab dan dampak dari hambatan dagang yang telah berpengaruh pada volume ekspor. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional selama tahun 2019 hingga 2024.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini mampu meninjau kinerja pemerintah Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang menjadi andalan dalam kelancaran perdagangan internasional ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok selama 2019-2024. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah melalui diplomasi ekonomi dalam upaya melancarkan perdagangan internasional, khususnya ekspor *CPO* ke Tiongkok di tahun 2019 hingga 2024. Diharapkan penelitian ini dapat membantu para *stakeholders* terkait dalam memahami kondisi ekspor *CPO* Indonesia ke Tiongkok yang dinamis, sehingga dapat membuat kebijakan dan strategi yang adaptif dan tepat dalam menghadapi kondisi pasar internasional yang dinamis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan mengkaji fluktuasi dalam perdagangan internasional komoditas minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (*CPO*) Indonesia yang diekspor ke Tiongkok selama tahun 2019 hingga 2024. Sebelumnya, penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu dan mencoba menarik kesimpulan. Kajian ini bertujuan untuk memahami posisi penelitian ini dari penelitian terdahulu dan mengidentifikasi kontribusi yang dapat diberikan terhadap studi yang telah ada.

NO	JUDUL/ PENGARANG	SUBSTANSI	HASIL	PERBEDAAN/PERSAMAAN
1	Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam Meningkatkan Ekspor CPO Tahun 2020-2023 (Cantika, Nuzulian, Iriansyah, Nurfitri, Suratiningsih, 2024)	Rumusan Masalah: Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dilakukan dan dampaknya terhadap peningkatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari tahun 2020 hingga 2023. Konsep/ Teori: Konsep Kerjasama Internasional dan Teori Diplomasi Ekonomi	Penelitian ini mengungkapkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) antara 2020-2023 menunjukkan kemajuan signifikan melalui peran pemerintah, Kementerian Perdagangan, dan KBRI Beijing.	Persamaan penelitian ini adalah memiliki subjek bahasan yang sama yakni ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok. Perbedaan dari kedua penelitian adalah latar tahun yang sedikit berbeda, kemudian teori dan konsep yang digunakan juga berbeda.
2	Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid 19 (Natsha Nabilla, 2024)	Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan strategi ekonomi baru Indonesia pada saat masa pandemi? Konsep/Teori:Diplomasi ekonomi negara berkembang Metode:Kualitatif	Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Strategi yang digunakan diantaranya: <i>economic salesmanship, networking, image branding/promotion, dan regulation management</i> .	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan diplomasi ekonomi dan hasil penelitian yang ingin mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam sektor perekonomian, sedangkan perbedaannya ada di subjek yang diteliti dan latar waktu cukup berbeda.
3	Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia-Tiongkok Melalui Mekanisme Ekspor-Impor Kelapa Sawit Tahun 2015-2019 (Andi Ansharullah,	Rumusan masalah: Bagaimana mekanisme diplomasi ekonomi Indonesia diterapkan melalui ekspor-impor kelapa sawit dalam hubungan dengan Tiongkok.	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kegiatan ekspor-impor kelapa sawit Indonesia-Tiongkok memberikan dampak signifikan terhadap	Persamaan dari penelitian ini adalah subjek penelitian yang sama, yakni ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok. Namun ditemukan perbedaan mulai dari latar waktu dan

	Ferlin Resnu Destandi, Salsa Nabila Rifky, 2020)	Konsep/ Teori: Teori Dual Ekonomi dan Diplomasi Ekonomi	perekonomian Indonesia, menjadi penyumbang devisa terbesar meskipun sering mengalami fluktuasi harga.	jenis teori yang diambil berbeda.
4	The Structure and Influencing Mechanisms of The Global Palm Oil Trade: A Complex Network Perspective. Sustainability, 17(7), 3062 (Zhang, Y., & Wang, L., 2024)	Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi struktur jaringan global perdagangan minyak sawit? Konsep/ Teori: Model gravitasi perdagangan + teori jaringan kompleks dalam GVC Metode: Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur perdagangan sawit dunia sangat dipengaruhi oleh populasi negara importir, jarak geografis, GDP, serta partisipasi dalam perjanjian perdagangan. Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil terbesar tetap menghadapi tekanan dari preferensi kebijakan importir seperti Tiongkok dan India.	Penelitian ini menggunakan teori GVC dan sama-sama membahas perdagangan CPO, Perbedaan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang kuantitatif dan tidak membahas spesifik satu negara.
5	Value Chain Analysis and Value-Added Enhancement of Indonesia Crude Palm Oil Supply Chain. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 9(2), 397-404 (Hidayati, J., & Hasibuan, S., 2019)	Rumusan Masalah: Bagaimana struktur rantai nilai (<i>value chain</i>) CPO Indonesia dan Bagaimana meningkatkan nilai tambahnya? Konsep/ Teori: Teori Value Chain Analysis dan Pengukuran nilai tambah. Metode: Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar nilai tambah berada pada sektor hilir (refining dan ekspor), sementara petani dan pabrik pengolah menerima margin rendah. Rekomendasi diarahkan pada industrialisasi lokal dan integrasi vertical untuk meningkatkan daya saing dalam GVC	Memiliki persamaan membahas GVC pada komoditas CPO Indonesia. Memiliki perbedaan latar waktu yang berbeda dan bentuk pembahasan yang berbasis model Porter's Value Chain pada sektor CPO di Indonesia

6	Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Perdagangan Internasional: Ekspor CPO ke Tiongkok 2019-2024	Rumusan Masalah: Bagaimana upaya diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia dalam menghadapi fluktuasi nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2024? Teori/ Konsep: Teori Perdagangan Internasional dan Konsep Diplomasi ekonomi Metode: Kualitatif	Nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok berperan signifikan dalam mendorong perekonomian negara. Meskipun memiliki volume ekspor yang besar tapi nilai ekspornya fluktuatif karena adanya berbagai hambatan dagang. Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai cara dalam bentuk diplomasi ekonomi untuk menghadapi tantangan perdagangan tarif dan non-tarif ini.	Penelitian ini mengkaji kondisi yang dilalui industri CPO selama periode 2019-2024 menggunakan teori perdagangan internasional dan konsep diplomasi ekonomi.
---	--	--	--	---

Peneliti telah meninjau beberapa penelitian terdahulu mengenai strategi dan upaya diplomasi ekonomi oleh pemerintah Indonesia, ekspor komoditas *CPO* ke Tiongkok, riwayat perkembangan diplomasi ekonomi Indonesia, hambatan-hambatan perdagangan internasional akibat kesenjangan struktural nilai rantai perdagangan global dalam sektor *CPO*. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti menemukan kajian mengenai diplomasi ekonomi didominasi oleh kajian pada tahun 2016 hingga 2023 saja. Penelitian ini secara khusus menyoroti hambatan perdagangan internasional *CPO* Indonesia ke Tiongkok dalam rentang waktu 2019-2024, yang mencakup masa pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan global. Penelitian ini juga mencoba mengisi kekosongan dengan menganalisis diplomasi ekonomi menggunakan kerangka empat pendekatan diplomasi negara berkembang menurut Kishan Rana, yang belum banyak diaplikasikan dalam konteks ekspor komoditas. Oleh karena itu, posisi dan kontribusi penelitian ini terletak pada fokus negara mitra, yaitu Tiongkok dalam periode waktu yang komprehensif, serta pendekatan konseptual yang spesifik terhadap kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan non-tarif dan fluktuasi nilai ekspor *CPO*.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 *Global Value Chain*

Konsep *Global Value Chain* (GVC) merupakan kerangka analitis penting dalam memahami struktur produksi dan perdagangan global yang terfragmentasi lintas negara. Menurut Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon (2005), GVC merujuk

pada jaringan aktivitas ekonomi internasional yang terlibat dalam desain, produksi, pemasaran, distribusi, hingga layanan purna jual suatu produk, di mana setiap tahapan bisa dilakukan di negara yang berbeda sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing. Namun, posisi negara dalam rantai ini sangat menentukan besarnya nilai tambah yang dapat diperoleh. Negara-negara yang hanya berperan di tahap awal, seperti penyedia bahan mentah, cenderung memperoleh nilai ekonomi yang lebih rendah dibanding negara yang menguasai tahap hilir seperti manufaktur lanjutan, distribusi, dan *branding*. Dalam konteks ini, struktur tata kelola atau *governance* dalam GVC menjadi kunci yang menentukan kemampuan negara berkembang untuk memperoleh manfaat optimal.

Pietrobelli dan Rabellotti (2006) menjelaskan bahwa *governance* dalam GVC dapat berbentuk hubungan pasar (market-based), jaringan (network-based), dan hierarki (hierarchy-based), yang masing-masing memberikan ruang berbeda bagi pelaku lokal untuk belajar dan naik kelas (*upgrading*) dalam rantai nilai. Mereka juga memperkenalkan konsep *industrial upgrading*, yang mencakup penguatan fungsi, proses, produk, hingga perluasan ke sektor lain sebagai langkah penting bagi negara berkembang agar tidak terjebak dalam posisi bernilai rendah. Lebih jauh, UNCTAD (2013) menegaskan bahwa GVC telah menjadi mesin utama integrasi ekonomi global, dengan kontribusi sekitar 80% dari total perdagangan dunia. Namun, manfaat dari partisipasi dalam GVC tidak terjadi secara otomatis. Negara-negara berkembang harus secara aktif membangun kapasitas produksi, memperkuat regulasi domestik, dan melakukan intervensi kebijakan agar dapat melakukan *functional upgrading* dan memperkuat posisi tawar dalam tata kelola

perdagangan internasional. Dengan kata lain, keberhasilan partisipasi dalam GVC sangat ditentukan oleh kualitas institusi nasional, strategi diplomasi ekonomi, serta kesiapan industri lokal dalam memenuhi tuntutan kualitas dan keberlanjutan global.

Dalam tatanan ini, negara yang hanya mengekspor bahan mentah, seperti Indonesia dalam kasus CPO, cenderung menempati posisi di tahap hulu (*upstream*) dan menerima nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan negara yang menguasai segmen hilir (*downstream*), seperti pengolahan lanjutan, *branding*, dan distribusi produk akhir (Gereffi et al., 2005). Hal ini menjadi akar dari keterbatasan daya saing struktural Indonesia dalam rantai global, karena meskipun volume ekspornya tinggi, nilai ekonominya masih relatif terbatas dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional. Indonesia menghadapi tantangan tambahan akibat ketergantungan pada ekspor CPO mentah, sementara Tiongkok lebih banyak mengimpor refined palm oil dan produk olahan lainnya. Berdasarkan data dari Malaysian Palm Oil Council (2024), lebih dari 99% palm oil yang diimpor Tiongkok merupakan produk refined, bukan bahan mentah. Dengan demikian, ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok memiliki nilai tawar yang lebih lemah dan berada dalam posisi bargaining yang tidak seimbang. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah juga membuat Indonesia lebih sulit merespons perubahan kebijakan standar mutu, lingkungan, dan keberlanjutan yang diterapkan Tiongkok melalui kebijakan *Green Food Development Plan* dan ketentuan *zero-deforestation supply chains*. Hal ini menempatkan Indonesia dalam struktur GVC yang bersifat *captive*—seperti dijelaskan oleh Gereffi et al.—di mana produsen di negara berkembang tunduk pada kontrol *buyer* atau negara pengimpor, baik dari segi

spesifikasi produk maupun standar keberlanjutan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak hanya kehilangan potensi nilai tambah, tetapi juga mengalami kerentanan struktural terhadap tekanan teknis dan non-tarif dari negara mitra dagang seperti Tiongkok.

Peneliti menggunakan konsep GVC untuk menganalisis posisi daya tawar komoditas mentah Indonesia yang rendah menyebabkan hambatan dalam perdagangan internasional ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok pada periode 2019-2024. Meskipun Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar dunia, namun tidak menjadi aktor dominan dalam pasar produk sawit global yang bermerek dan bernilai tinggi. Untuk keluar dari posisi ini, pemerintah Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menjalankan praktek diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi dapat dilakukan untuk dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menegosiasikan standar lingkungan, tarif, dan kebijakan perdagangan sawit yang telah menjadi hambatan dalam perdagangan internasional CPO.

1.6.2 Diplomasi Ekonomi

Dalam dunia hubungan internasional kontemporer, diplomasi ekonomi telah menjadi instrument utama dalam memajukan kepentingan nasional, khususnya bagi negara-negara berkembang yang terlibat dalam perdagangan global, seperti Indonesia. Menurut Kishan S. Rana (2007) diplomasi ekonomi tidak hanya terbatas pada promosi perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup penguatan kerja sama ekonomi internasional, pengelolaan negosiasi dagang, serta keterlibatan aktif misi diplomatik dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional. Rana menekankan bahwa diplomasi ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya

saing, memperluas akses pasar, dan mengamankan sumber daya ekonomi melalui pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi khususnya di negara berkembang.

Dalam bukunya yang berjudul *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries*, Kishan S, Rana (2007) menguraikan bahwa terdapat empat tahap utama yang umumnya dilalui oleh negara berkembang dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, diantaranya adalah *economic salesmanship, networking, image building*, dan *management of regulations*. Tahapan pertama adalah *Economic Salesmanship*, yang mana perwakilan negara seperti duta besar dan diplomat bertugas memasarkan produk-produk nasional ke luar negeri, mempromosikan ekspor, menginisiasi misi dagang, dan menarik investasi asing langsung (FDI). Dalam konteks ini, diplomat bertindak layaknya duta besar ekonomi negara. Tahapan selanjutnya adalah *Networking*, pada tahap ini negara membangun kerja sama ekonomi secara bilateral dan multilateral, Tahapan ini melibatkan pembentukan kemitraan dengan berbagai aktor seperti kamar dagang, perusahaan swasta, lembaga kajian (*think-tank*), dan organisasi non-negara lainnya di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya adalah memperluas saluran komunikasi dan kerja sama antara aktor negara dan non-negara. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu *Image Building/ Image Promotion*. Pada tahap ini pemerintah berupaya membangun citra positif negara serta produk-produk ekspor. Tahapan ini biasanya dilakukan melalui kerja sama antara sektor public dan swasta. Bagi negara berkembang, ini sangat penting dalam melawan stereo negative, seperti isu lingkungan, kualitas barang, atau pelanggaran HAM dalam rantai produksi. Tahapan terakhir adalah *Management of Regulation*. Tahapan ini mencakup

penyusunan dan perundingan kebijakan atau regulasi perdagangan, serta diplomasi regional melalui inisiatif pembentukan kelompok kerja baru. Pada tahap ini diperlukannya koalisi antar lembaga pemerintahan dan sektor swasta untuk menyusun standar domestik yang baru, serta melibatkan pelaku bisnis, lembaga kajian, dan LSM dalam proses negosiasi internasional.

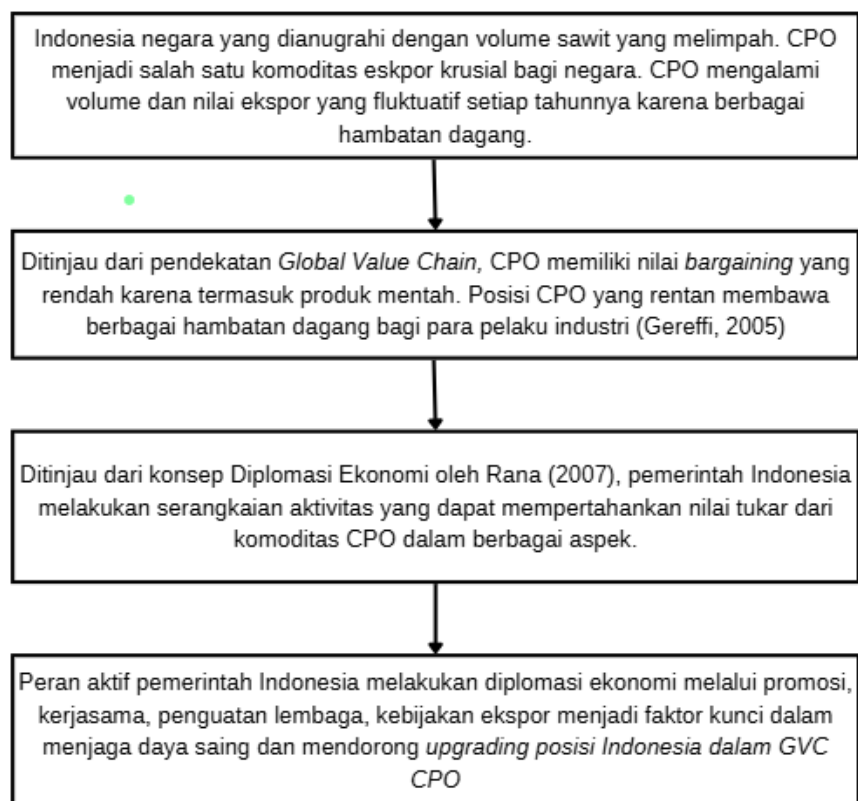
Dalam kerangka ini, Rana ingin menegaskan bahwa diplomasi ekonomi yang berhasil tidak hanya bergantung pada kemampuan negosiasi, tetapi juga pada sinergi antar aktor negara seperti kementerian luar negeri, kamar dagang, investasi dan pihak lainnya. Selain itu keberhasilan dari diplomasi ekonomi juga ditentukan oleh pemahaman mendalam dari para aktor ini dalam menghadapi dinamika pasar global. Konsep diplomasi ekonomi digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami dan mengevaluasi respons pemerintah Indonesia terhadap hambatan perdagangan ekspor CPO ke Tiongkok periode 2019-2024. Konsep diplomasi ekonomi menjadi alat untuk menelaah strategi negosiasi, koordinasi lintas lembaga, dan bentuk intervensi diplomatik yang dilakukan pemerintah guna mempertahankan dan memperluas akses pasar. Penggunaan konsep ini memungkinkan penulis untuk melihat sejauh mana diplomasi Indonesia bersifat proaktif dan strategis dalam menghadapi tekanan dagang serta menjaga keberlanjutan ekspor komoditas strategis nasional.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama untuk membangun kerangka analisis yakni konsep *global value chain* oleh Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon yang digunakan untuk menjelaskan sebab fluktuasi ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok, khususnya terkait daya saing bahan mentah yang rendah

menyebabkan hambatan tarif dan non-tarif. Serta konsep diplomasi ekonomi oleh Kishan Rana untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah Indonesia merespons fluktuasi tersebut melalui strategi diplomasi.

1.6.3 Bagan Alur Kerangka Berpikir

Gambar 1.2
Bagan Alur Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

a. *Global Value Chain*

Konsep *Global Value Chain* (GVC) merupakan kerangka analitis penting dalam memahami struktur produksi dan perdagangan global yang

terfragmentasi lintas negara. Menurut Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon (2005), GVC merujuk pada jaringan aktivitas ekonomi internasional yang terlibat dalam desain, produksi, pemasaran, distribusi, hingga layanan purna jual suatu produk, di mana setiap tahapan bisa dilakukan di negara yang berbeda sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing. Namun, posisi negara dalam rantai ini sangat menentukan besarnya nilai tambah yang dapat diperoleh. Negara-negara yang hanya berperan di tahap awal, seperti penyedia bahan mentah, cenderung memperoleh nilai ekonomi yang lebih rendah dibanding negara yang menguasai tahap hilir seperti manufaktur lanjutan, distribusi, dan *branding*. Dalam konteks ini, struktur tata kelola atau *governance* dalam GVC menjadi kunci yang menentukan kemampuan negara berkembang untuk memperoleh manfaat optimal.

b. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah bentuk diplomasi yang bertujuan mendukung kepentingan ekonomi nasional melalui instrument-instrumen diplomatik seperti promosi ekspor, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional. Kishan S. Rana (2007; 2011) menjelaskan bahwa diplomasi ini dijalankan melalui empat tahap utama: *economic salesmanship*, *networking*, *image building*, dan *regulation management*. Diplomasi ekonomi menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar melalui kerja sama lintas sektor.

1.7.2 Definisi Operasional

a. *Global Value Chain*

Dalam tatanan GVC, negara yang hanya mengekspor bahan mentah, seperti Indonesia dalam kasus CPO, cenderung menempati posisi di tahap hulu (*upstream*) dan menerima nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan negara yang menguasai segmen hilir (*downstream*), seperti pengolahan lanjutan, *branding*, dan distribusi produk akhir (Gereffi et al., 2005). Hal ini menjadi akar dari keterbatasan daya saing struktural Indonesia dalam rantai global, karena meskipun volume ekspornya tinggi, nilai ekonominya masih relatif terbatas dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional.

Peneliti menggunakan konsep ini untuk dapat memahami posisi dan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional CPO, khususnya di pasar Tiongkok. Konsep ini relevan untuk menganalisis kesenjangan struktural dan keterbatasan daya saing yang dihadapi Indonesia dalam rantai pasok global, serta untuk menelaah strategi upgrading yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan posisinya di pasar Tiongkok melalui diplomasi ekonomi.

b. Diplomasi Ekonomi

Penulis akan menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang merupakan sebagai alat analisis untuk menganalisis seberapa serius upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif dan non tarif perdagangan internasional studi kasus ekspor CPO ke Tiongkok periode

2019 hingga 2024. Penulis akan menggunakan 4 tahapan utama dalam menjalankan diplomasi ekonomi menurut Rana S. Kishan, yakni *economic salesmanship, networking, image building, dan regulation management*. Konsep ini akan berperan penting untuk mengkaji secara objektif upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional ekspor CPO ke Tiongkok selama tahun 2019-2024.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasar pada latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah ditulis sebelumnya, maka argumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pemerintah Indonesia telah berupaya menghadapi hambatan perdagangan yang disebabkan oleh lemahnya posisi dan daya saing CPO sebagai bahan mentah dengan melakukan berbagai aktivitas diplomasi ekonomi seperti *economic salesmanship, networking, image building, dan regulation of mangement*.

1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan Strauss dan Corbin, yang dikutip oleh Creswell (1998:24), penelitian kualitatif mampu memberikan penemuan yang tidak bisa didapatkan melalui statistik atau pengukuran kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang partisipan, yang diperoleh melalui analisis mendalam (Rahmat, 2009:3). Penerapan metode

kualitatif memungkinkan para peneliti untuk lebih memahami fenomena yang sedang dikaji guna menjawab pertanyaan penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memungkinkan peneliti melakukan prediksi melalui analisis hipotesis terhadap variabel-variabel yang terkait dalam hubungan korelatif (Nugrahani, 2014: 31). Penulis akan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan kondisi perdagangan internasional komoditas CPO ke Tiongkok yang dinamis dan nilainya yang fluktuatif melalui konsep *global value chain* serta upaya pemerintah Indonesia menghadapi hambatan perdagangan internasional yang akan dianalisis dengan konsep diplomasi ekonomi dengan mengacu pada kerangka Kishan Rana.

1.9.2 Situs Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dapat digunakan sebagai sumber untuk mengumpulkan data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut dapat dianalisis secara kritis untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Nugrahani, 2014: 112). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti melalui *desk research* untuk menganalisis fluktuasi yang terjadi pada nilai ekspor CPO selama periode 2019-2024 serta upaya pemerintah Indonesia menghadapi tantangan perdagangan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang telah berhubungan cukup lama dan intensif dengan bidang yang diteliti serta terlibat sepenuhnya dalam penelitian (Nugrahani, 2014:62). Pada penelitian ini, subjek yang dipilih adalah perdagangan

internasional, fluktuasi nilai ekspor CPO ke Tiongkok, dan diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Nugrahani (2014: 107), data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat lunak dan terdiri dari kata-kata, kalimat, ungkapan, serta tindakan yang perlu dicatat dengan teliti. dalam penelitian ini, penulis berusaha memperoleh informasi seputar kondisi pasar perdagangan global, berita mengenai kondisi ekspor CPO tahun ke tahun, berita maupun publikasi pemerintah mengenai diplomasi ekonomi dan informasi lainnya.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif umumnya data primer bersumber dari peristiwa, tempat, narasumber, teks, dan artefak (Nugrahani, 2014:212). Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari sumber resmi, laporan maupun dokumen yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan situs resmi terkait yang didapatkan melalui internet. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menjawab rumusan masalah yang berupa pertanyaan "bagaimana", sehingga penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Data penelitian ini akan dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan *internet research*. Studi kepustakaan teknik menelaah atau menganalisis dari berbagai sumber seperti buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan sebagai landasan

penelitian (Sarwono, 2006: 26). Sedangkan *internet research* merupakan usaha mendapatkan data penelitian menggunakan perangkat elektronik melalui server internet (Sarwono, 2006: 229)

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah serangkaian proses yang melibatkan pemilahan, penafsiran, dan penyajian data untuk membangun argumen (Rosyidin, 2019:61). Argumen dalam penelitian memerlukan bukti yang mendukung, yang disebut data berupa fakta. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis kongruen. Teknik ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada variabel penjelas dari teori yang digunakan sebagai penyaring data (Rosyidin, 2019:61).

1.10 Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdapat empat bab yang akan membahas secara spesifik mengenai analisis dan penunjang penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1.10.1 BAB I

Bab pertama dari penelitian ini memberikan deskripsi umum tentang topik yang diinvestigasi beserta elemen-elemen pendukung lainnya. Di dalamnya mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, tinjauan literatur, perkembangan terbaru dalam bidang tersebut, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sasaran data yang akan dikumpulkan. Penyusunan bab ini juga menjelaskan *overview* dinamika perdagangan internasional CPO dalam tatanan rantai pasok global. Bab ini juga

menjelaskan bagaimana hipotesis penelitian yakni pemerintah Indonesia secara aktif melaksanakan diplomasi ekonomi dalam menghadapi hambatan dalam perdagangan internasional ekspor CPO ke Tiongkok.

1.10.3 BAB II

Pada bab kedua, penulis akan menyajikan gambaran umum penelitian yang relevan dengan topik. Sehingga dapat memperkuat gambaran atau arah penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut di bab berikutnya. Secara lebih spesifik, penulis akan mengkaji daya saing ekspor CPO Indonesia ke di dunia dan Tiongkok. Penulis akan mengkaji bagaimana kondisi lemahnya daya saing membawa hambatan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan pentingnya hubungan dagang antara Tiongkok dan Indonesia dalam sektor perdagangan CPO. Selanjutnya akan diteliti lebih dalam juga mengenai hambatan yang ada pada perdagangan internasional, seperti tarif, kuota, standarisasi, regulasi dan implikasinya bagi volume ekspor dan pendapatan negara. Sehingga terdapat korelasi sebab akibat antara urgensi mengatasi hambatan perdagangan untuk keberlanjutan industri sawit dan perekonomian Indonesia.

1.10.3 BAB III

Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia menghadapi hambatan perdagangan dengan analisis konsep diplomasi ekonomi dan konsep *Global Value Chain*. Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan menjelaskan keterkaitan dari posisi *bargaining* membawa hambatan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan perdagangan internasional tersebut menggunakan konsep diplomasi ekonomi oleh Kishan Rana.

1.10.4 BAB IV

Pada bab ini, penulis akan membahas bagaimana kesimpulan dan penelitian bermetode kualitatif ini. Kesimpulan diperoleh melalui pembahasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis dengan data dan teori yang ada. Penulis akan melengkapi bab ini dengan saran yang diperlukan untuk menunjang penelitian selanjutnya.